

# Pancasila dan pendidikan antikorupsi: Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi

**Mohammad Nuri Tamami**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 25050110148@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pancasila, pendidikan antikorupsi, perguruan tinggi, integritas, karakter mahasiswa.

## Keywords:

Pancasila, anti-corruption education, higher education, integrity, student character

## ABSTRAK

Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral bangsa Indonesia, memiliki peranan krusial dalam pembentukan karakter warga negara. Namun demikian, maraknya praktik korupsi mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan kondisi sosial yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya membangun generasi yang berintegritas. Metode studi kepustakaan digunakan dengan mengkaji literatur terkait pendidikan antikorupsi yang berbasis pada Pancasila. Temuan kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan disiplin

melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila berkontribusi dalam pembentukan karakter antikorupsi pada mahasiswa. Model pembelajaran kontekstual, seperti Project Citizen, terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung. Pendidikan antikorupsi berbasis Pancasila di perguruan tinggi menjadi strategi strategis dalam menumbuhkan kesadaran moral dan etika guna mewujudkan masyarakat yang adil, jujur, dan berkeadaban.

## ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the state and the moral compass of the Indonesian nation, plays a crucial role in shaping the character of its citizens. However, the prevalence of corruption indicates a gap between Pancasila's values and the existing social reality. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in anti-corruption education at the university level as an effort to build a generation with integrity. A literature review method was employed by examining academic sources related to Pancasila-based anti-corruption education. The findings reveal that the integration of values such as honesty, responsibility, justice, and discipline through the Pancasila Education course contributes to forming students anti-corruption character. Contextual learning models, such as Project Citizen, have proven effective in internalizing these values through direct experience. Anti-corruption education based on Pancasila in higher education serves as a strategic approach to fostering moral and ethical awareness to create a just, honest, and civilized society.

## Pendahuluan

Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, yang menuntun warga negara Indonesia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam kehidupan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bermasyarakat (Faslah, 2025). Pancasila merupakan ideologi pokok yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara etimologis, istilah ini berarti "lima prinsip" yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap prinsip dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan semata-mata sebagai konsep yang bersifat tetap. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa Tuhan merupakan sumber segala kekuatan dan kehidupan. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Prinsip Persatuan Indonesia mengharuskan seluruh rakyat menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan menegaskan pentingnya demokrasi dalam proses pengambilan keputusan negara. Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Baihaqi, 2023).

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari kata Latin *corrupti* yang berarti tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Korupsi membawa berbagai efek negatif kepada masyarakat, termasuk peningkatan angka kemiskinan, timbulnya ketidakadilan sosial, penurunan investasi, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Walaupun upaya untuk memberantas korupsi telah menjadi fokus reformasi sejak 1998, praktik korupsi tetap merupakan masalah serius yang sulit diberantas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, ditekankan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah menciptakan negara yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Namun, cita-cita ini sering terhambat oleh praktik korupsi yang merajalela dan merugikan negara. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.298 orang yang menjadi terdakwa kasus korupsi selama tahun 2020 dengan total kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun (Dipa, 2022).

Sejalan dengan pandangan tersebut, pendidikan antikorupsi merupakan strategi penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendidikan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang bahaya dan dampak korupsi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan antikorupsi berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila diharapkan menjadi media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran moral serta mendorong penolakan terhadap segala bentuk korupsi di masyarakat (Sofi, 2025). Pendidikan antikorupsi bukan hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan sikap kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan bisa menjadi metode yang efektif untuk membentuk masyarakat yang adil, bebas dari korupsi, dan beradab.

## **Pembahasan**

### ***Peran Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Antikorupsi Mahasiswa***

Pancasila berperan sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi identitas khas sekaligus pembeda dari bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memuat makna yang mendalam dan tetap relevan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila terdiri atas lima sila yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter mahasiswa melalui penguatan etika, moral, dan perilaku yang mencerminkan jati diri bangsa. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kampus sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Rahma, 2025).

Salah satu permasalahan sosial yang bersifat kronis di Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan tercela yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara serta berbagai pihak, termasuk masyarakat yang taat membayar pajak. Sepanjang tahun 2024, sejumlah kasus korupsi terjadi di Indonesia dan mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Selain kerugian materil, korupsi juga menimbulkan kerugian moral yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pejabat pemerintah. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, permasalahan korupsi merupakan isu kompleks yang memerlukan penyelesaian dan solusi strategis secara menyeluruh (May et al., 2025).

Proses pendidikan antikorupsi dimulai dengan pengenalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika bangsa yang wajib dipahami serta diresapi oleh setiap peserta didik. Tahap ini tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan juga dilaksanakan melalui pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara kausal, internalisasi nilai Pancasila yang kokoh mendorong pembentukan karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada individu. Karakter tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi praktik korupsi, khususnya di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang berlandaskan Pancasila menjadi strategi esensial dalam membangun integritas sekaligus menanggulangi korupsi secara lebih efektif (Sofi, 2025).

### ***Model Pembelajaran Praktikum dalam Pendidikan Antikorupsi***

Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 35 Ayat (3) yang mewajibkan setiap kurikulum program sarjana dan diploma memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Kewajiban ini menunjukkan pentingnya peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan

mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli yang menekankan bahwa pendidikan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi menjadi fondasi utama dalam membangun integritas, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa (Mulyoto et al., 2020).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Kepribadian (MKK) yang wajib diajarkan dalam seluruh program studi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang pembangunan (Mulyoto et al., 2020). Pengembangan modul praktikum untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan menerapkan model Project Citizen sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. Proses pengembangan modul ini mengikuti model desain pembelajaran Dick and Carey yang terdiri dari sepuluh tahapan sistematis. Setiap tahapan dalam model tersebut dirancang guna menjamin bahwa modul yang dihasilkan dapat meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sekaligus membina karakter antikorupsi melalui kegiatan praktikum yang bersifat kontekstual dan partisipatif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam konteks kehidupan akademik maupun sosial

### ***Pendekatan Psikomotorik dalam Pendidikan Antikorupsi***

Perkembangan psikomotorik merupakan aspek krusial dalam pertumbuhan anak usia dini yang harus dikembangkan secara optimal (Kumala, 2022). Namun, perlu ditegaskan bahwa pembelajaran psikomotorik tidak hanya relevan bagi anak usia dini saja. Perkembangan psikomotorik merupakan proses yang berkesinambungan dan berlangsung sepanjang hayat manusia. Perkembangan psikomotorik juga dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam merespons melalui gerakan fisik. Kemampuan ini diperoleh melalui proses pendidikan dan pengalaman belajar yang memiliki peran signifikan serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Model pembelajaran Project Citizen merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan semata sebagai objek penerima pengetahuan dari guru atau dosen. Dalam pendekatan ini, peran guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung pengembangan potensi serta kecerdasan siswa. Tujuan utama dari pendekatan berpusat pada siswa adalah untuk membantu siswa memahami materi pelajaran secara lebih mendalam sekaligus mengoptimalkan pengembangan kemampuan mereka. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri, sehingga mampu menjadi individu yang mandiri dalam belajar dan menyelesaikan permasalahan (Putri et al., 2023).

Pengembangan modul praktikum untuk mata kuliah Pancasila dengan menggunakan model Project Citizen merupakan langkah strategis dalam menanamkan

nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (Mulyoto et al., 2020). Pada poin kelima instruksi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) perlu diperkuat guna membentuk generasi bangsa yang berkarakter kuat, mencintai tanah air, memiliki semangat bela negara, serta berperan dalam memperkuat identitas bangsa. Pendekatan Project Citizen diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk aktif menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan antikorupsi melalui pembelajaran yang bersifat kontekstual dan partisipatif, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, pembahasan mengenai pendekatan pendidikan antikorupsi menyajikan metode yang lebih terstruktur dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama dalam pendidikan antikorupsi, yakni dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (Nurhalizah, 2025). Ketiga dimensi tersebut meliputi pemahaman nilai dalam ranah kognitif, pembentukan sikap dalam ranah afektif, serta penerapan nilai dalam tindakan nyata pada ranah psikomotorik. Pendekatan ini menjamin bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya terfokus pada pengetahuan semata, melainkan juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mendukung pencegahan korupsi secara komprehensif. Keduanya menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif tidak dapat berhenti pada tataran teori semata, melainkan harus disertai pengalaman konkret yang mampu memperkuat karakter antikorupsi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

## Kesimpulan dan Saran

Pendidikan antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas. Melalui proses pembelajaran yang terorganisir dengan baik, nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara optimal sehingga mendorong sikap anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya menyajikan pemahaman secara konseptual, melainkan juga menanamkan sikap dan perilaku konkret yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan aplikatif, seperti modul praktikum serta pembelajaran berbasis proyek, guna memperkuat internalisasi nilai antikorupsi. Perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya hendaknya memperkuat integrasi pendidikan antikorupsi dengan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum secara berkelanjutan. Selain itu, peran aktif pendidik sebagai teladan moral sangatlah penting agar pesan pendidikan antikorupsi dapat diterima dan diimplementasikan oleh peserta didik secara konsisten.

## Daftar Pustaka

- Baihaqi, K. (2023). *Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia*. 1(6), 694–698. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Gufron, M. H. I., Chamidah, D., & Firdausy, A. (2022). Pendidikan anti korupsi berbasis Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Mahad al-Jamiah

- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/13574/1/13574.pdf>
- Kumala, A. (2022). Pengembangan aspek psikomotorik anak usia dini pada kegiatan seni tari di TK Pertiwi Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Tesis, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- May, I., Inggris, S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). *Korupsi bukan budaya bangsa : Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi*. 3, 1587–1591.
- Mulyoto, G. P., Guru, P., Ibtidaiah, M., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Malang, K., & Artikel, S. (2020). *Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa*. 17(1), 67–80. <http://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Nurhalizah, S. (2025). *Pancasila dan Korupsi*. 3(31), 595–603.
- Putri, C. A., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2023). *MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI STUDENT CENTERED*. 2(2), 95–105.
- Rahma, R. K. (2025). *Mengakar Pancasila dalam diri mahasiswa : Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi*. 3, 67–77.
- Sofi, D. F. (2025). *Menggali nilai pancasila dalam menyikapi kasus intoleransi di masyarakat*. 3, 304–313.
- Kumala, A. (2022). Pengembangan aspek psikomotorik anak usia dini pada kegiatan seni tari di TK Pertiwi Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Tesis, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).